

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan studi partisipasi politik mempunyai kaitan dengan perubahan – perubahan yang terjadi dalam ilmu politik. Setelah perang dunia II para ilmuwan politik beranggapan bahwa pendekatan tradisional (yang juga disebut sebagai pendekatan kelembagaan atau institusional) tidak lagi memadai untuk menjelaskan kehidupan politik. Oleh karena itu perlu dikembangkan pendekatan baru yang lebih cermat dan mampu menjelaskan kehidupan politik. Secara lebih akurat dan sistematis. Untuk keperluan itu, para ilmuwan politik mengembangkan pendekatan behavioral. Dilihat dari sudut ini, studi partisipasi politik mengalami perkembangan pesat dibawah pendekatan tingkah laku.

Pergeseran dari pendekatan kelembagaan ke pendekatan tingkah laku menghasilkan pergeseran dalam fokus perhatian dari ilmu politik dari masalah kelembagaan politik formal ke masalah kaitan antara struktur politik dengan masyarakat. Bila studi-studi ilmu politik yang menggunakan pendekatan tingkah laku lebih banyak mengkaji interaksi antara anggota-anggota masyarakat (baik dalam kelompok-kelompok maupun secara perorangan) dengan penguasaan politik (yang sering disebut sebagai *decision makers*). Hal ini disebabkan karena ilmuwan politik menjadi lebih tertarik pada suara-suara yang berkembang dalam masyarakat dan dampaknya bagi para pengambil keputusan (yaitu penguasa politik).

Perkembangan di atas juga berarti bahwa telah terjadi demokratisasi dalam studi ilmu politik pada era pendekatan tingkah laku, dalam arti bahwa suara rakyat mendapat tempat yang penting dalam kajian-kajian politik. Hal ini sesuai dengan paham liberal yang menjadi dasar masyarakat sehingga pendekatan tingkah laku juga disebut sebagai pendekatan pluralis ilmu politik.

Analisa struktural fungsional yang dirumuskan oleh Almond dan Powell secara jelas menunjukkan alur pemikiran seperti itu. Bagi mereka, kehidupan politik adalah dijalankannya fungsi-fungsi dalam sistem politik, antara lain adalah input functions yang sebagian besar adalah kegiatan yang disebut sebagai partisipasi politik. Memaksa itu. Orang disebut haruslah menyampaikan kepentingan dan aspirasinya sehingga dapat diperhatikan oleh si pembuat keputusan. Meskipun begitu, tidak ada jaminan bahwa setiap kepentingan atau aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan partisipasi politik itu akan dipenuhi dan diperhatikan oleh keputusan yang dikeluarkan.

Alasan lain bagi perkembangan studi partisipasi politik yang pesat adalah kepedulian para ilmuwan politik terhadap pelaksanaan ide-ide demokrasi, tidak saja di negara mereka sendiri, tetapi juga di negara-negara lain. Ide mendasar adalah bahwa demokrasi seyogianya menjadi paham bagi semua orang.

Salah satu perintis ke arah perlunya ilmu politik memiliki ciri-ciri ilmu pengetahuan adalah David Easton. Dalam salah satu tulisannya, ia memberikan beberapa ciri pendekatan tingkah laku. Dua dari delapan ciri yang disebutkannya berkaitan dengan masalah yang dibicarakan di sini, pertama, teknik pengumpulan dan penafsiran data : kedua, ilmu murni. Bagi Easton, pengabaian metode penelitian